

ANALISA MODEL MARS UNTUK PENANGANAN KORUPSI

Rosalita Agustini
rosalita@ecampus.ut.ac.id
Universitas terbuka semarang

ABSTRAK

Korupsi di negara kita semakin merajalela, Indonesia adalah salah satu negara yang sulit untuk memberantas korupsi, meminimalisasikan laju korupsi dibuatlah sebuah model perilaku organisasi yang disingkat MARS, motivasi, kemampuan, bakat dan juga peran. Korupsi diartikan perbuatan yang tidak baik atau curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan norma-norma agamamateriil dan hukum, banyak kasus korupsi yang melanda dunia salah satu nya Indonesia, sehingga negara lagiberkembang seperti Indonesia sangat sulit untuk keluar dari jerat korupsi ini, apalagi pelaku korupsi memperkaya diri dengan mengajak keluar atau nepotisme.

Keyword: korupsi, Analisa Mars, negara berkembang.

ABSTRAK

Corruption in our country is increasingly rampant, Indonesia is one of the countries where it is difficult to eradicate corruption, to minimize the rate of corruption a model of organizational behavior was created which is abbreviated as MARS, motivation, ability, talent and also role. Corruption is defined as an act that is not good or not fraudulent, can be bribed, is immoral, deviates from the sanctity and norms of religion, material and law. There are many cases of corruption that have hit the world, one of which is Indonesia, so that developing countries like Indonesia are very difficult to get out of the trap of corruption. Moreover, the perpetrators of corruption dirty themselves by asking for leave or nepotism.

Keywords: corruption, Mars Analysis, developing countries.

Submitted: 29-04-2024 | Accepted: 30-04-2024 | Published: 31-04-2024

1. Pendahuluan

Definisi Korupsi muncul beranekaragam karena banyak sekali ilmuwan dan teoritisosial dan politik yang mencoba memberikan memberikan definisi korupsi dengan berbagai makna, secara istilah korupsi berasal dari kata *coruptio* yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral dan menyimpang dari kesuciatian (Hamzah, 1985)

Korupsi tidak akan pernah bisa diberantas. Hal yang paling memungkinkan adalah meminimalisasi laju korupsi untuk menekan dampak negatifnya. Antropolog melihat korupsi sebagai ritual yang melekat dalam budaya kebiasaan setempat.

Misalnya contoh pemberian upeti, tanda balas jasa dan ucapan terimakasih, di sisi lain, para politisi beranggapan korupsi adalah sarana partisipasi politik untuk memaksa orang melakukan kehendak, misalnya melalui serangan fajar untuk memaksa voter memilih calon tertentu dalam sebuah pemilihan langsung.

MARS :

1. Motivasi (Motivation) sebagai kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah intensitas dan ketekunan perilaku. Motivasi adalah tujuan-diarahkan, motivasi yang ada dalam diri seseorang bukan perilaku mereka yang sebenarnya. Maka arah, intensitas dan ketekunan adalah kognitif (pikiran) dan kondisi emosional yang secara langsung menyebabkan kita untuk bergerak.
2. Kemampuan (abilities) personal dapat juga membuat perbedaan dalam perilaku dan kinerja seseorang, kemampuan mencakup bakat alami dan kemampuan belajar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap tugas, bakat alami membantu seseorang mempelajari tugas secara spesifik sehingga lebih cepat dan lebih baik, seseorang secara fisik dan mental juga dipengaruhi oleh bakat, demikian juga untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan, dengan bakat seorang individu dapat belajar lebih cepat dan berpotensi mencapai kinerja. Kemampuan belajar adalah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki saat ini, baik keterampilan fisik dan mental serta pengetahuan yang diperoleh.
3. Bakat dan kemampuan belajar berkaitan erat dengan kompetensi, Kompetensi merupakan karakteristik seseorang yang dapat menghasilkan kinerja prima, kompetensi banyak dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi, seperti: pengetahuan, keterampilan, bakat, kepribadian, konsep diri, nilai-nilai.
4. Persepsi peran (*role perceptions*), sejauh mana orang memahami tugas/ pekerjaan (peran) yang ditugaskan atau yang diharapkan dari mereka. Persepsi peran memiliki tiga komponen; pertama, karyawan memiliki akurasi dalam memahami tugas-tugas mereka ketika memiliki persepsi peran. kedua, orang-orang memiliki persepsi peran yang akurat mereka akan memahami prioritas dari berbagai tugas

dan mampu ekspektasi kinerja. ketiga, persepsi peran membantu memahami perilaku yang disukai atau prosedur untuk mencapai tugas yang diberikan.

5. Faktor situasional (*Situational factors*) mencakup semua kondisi di luar kontrol langsung karyawan yang membatasi atau memfasilitasi perilaku dan kinerja. Beberapa faktor situasi seperti preferensi konsumen dan kondisi ekonomi berasal dari lingkungan eksternal.

Korupsi

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah definisi korupsi yang diterangkan oleh para ahli berdasarkan hasil riset dan pengalamannya.

1. Nurdjana (1990)

Pengertian Korupsi Menurut Nurdjana, korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu "corruptio" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.

2. UU No. 20 Tahun 2001

Pengertian Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif Analisis berdasarkan MARS

1. Motivasi

Stephen p robbins dalam bukunya mengatakan bahwa motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan.

2. Abilities

Kemampuan dimana biasa kita lihat dari mars diatas dikatakan adanya kemampuan dan di dalamnya ada bakat contohnya ada bakat untuk mencuri uang yang bukan hak miliknya

2. Persepsi

Bagi seorang oknum persepsi mereka bahwa adanya peran untuk korupsi dimana, dimana oknum menyadari perannya sehingga dia akan mengusahakan untuk mendapatkan bagian di dalamnya untuk masuk ke kantongnya.

3. Faktor Situasional

Faktor ini yang mengandalkan situasi ini dimana situasinya memungkinkan untuk melakukan korupsi.

Dalam perspektif yang lain lagi, korupsi bisa dilihat sebagai instrument kekuasaan untuk menjatuhkan atau mempahlawakan orang-orang dalam arena politik, hari ini label koruptor juga bisa membuat orang kehilangan tidak hanya kehormatan namun juga kehormatan namun juga kedudukan dan jabatannya hanya dalam sekejap.

Komisi pemberantasan korupsi, institusional pemberantasan korupsi, hari ini korupsi oleh elit masih memiliki corak yang serupa dengan orde lama dan orde baru, umunya persoalan persekutuan ekonomi-politik, dimana suap diperlukan untuk memuluskan berjalannya sebuah proyek ekonomi, hanya saja perlakuannya berbeda.

Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lambing sampingan negara merupakan salah satu produk reformasi di masa pemerintahan megawati (Napitulu 2010). Kpk sendiri dibentuk menggunakan UU no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai payung hukum sampai saat ini KPK sudah melakukan empat kali pergantian pimpinan.

Sebagai institusi KPK memang telah melakukan perannya melakukan pemberantasan korupsi akan tetapi ibarat memakan bubur ganas, KPK mencoba menyendok bubur tsb dari bagian pinggir piring yang paling realistis untuk dimakan.

Pembentukan Lembaga pemberantas dan penanggulangan korupsi di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, dimasa orde lama terdapat Panitia retooling Aparatur negara yang tugasnya mendata pejabat. Selanjutnya di era yang sama muncul pula operasi Budhi yang tidak hanya mendata pejabat korup namun juga memprosesnya melalui jalur hukum.

Berikut dilihat dari film Film Omnibus Berjudul "Kita Versus Korupsi". Menurut Widjaja (2008:84), film adalah tekni audio-visual yang sangat efektif dalam mempengaruhi penonton-penontonnya. Film yang baik yang berisikan tontonan yang menghibur terutama

dalam film ini, film yang diperankan oleh nicholas Saputra, revalina S temat, Tora sudiro dkk, adalah sebuah film yang di buat untuk mengingat atau mengenang perjuangan dalam melawan korupsi, dua anak muda yang diperankan Nicolas dan revalina ingin kawin lari dengan belunggu dari ayah Perempuan yang mengekang anak perempuannya. Mereka mengandalkan berbagai cara untuk melancarkan urusan KUA dengan memberikan uang kepada calo.

Sedangkan ditempat lain ada seorang guru honorer yang juga sedang berjuang dengan nasibnya untuk mempertahankan kehidupannya dan juga anak-anak muridnya tetap terpelihara dalam pelajarannya. Guru honorer yang diperankan Agus ini bertahan meneruskan hidup dan keluarganya dan tetap berjuang supaya bertahap dengan car acara yang lurus tanpa nyogok untuk menjadi guru tetap

Lain lagi dengan keluarga ketiga keluarga yang diperankan tora sudiro dan dominiq, seorang ayah yang bertahan mencari nafkah demi keluarganya untuk bertahan dari himpitan ekonomi, istrinya penjahit dan gajinya kecil dia terpaksa melakukan korupsi karena anaknya sakit. Terpaksa dia melakukan perbuatan hina dengan mengambil beras yang memang tidak seharusnya masuk ke dalam Gudang .Film berjudul "Kita Versus Korupsi" merupakan film omnibus, kata mencerminkan realitas sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat di dalam negeri.

Kenapa penulis menulis tentang film dalam model analisis ini karena di dalam film itu juga tersirat edukasi untuk mengatakan kepada kita semua bahwa dengan film ini kitajangan melakukan korupsi. Padahal film berbasis edukasi dan budaya telah disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2009, bahwa perfilman merupakan produk budaya kreatif, sehingga Pemerintah menaungi dunia perfilman ini dibawah Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan untuk menangani konten isi film itu sendiri, Pemerintah menaunginya di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Film tidak hanya semata menonjolkan unsur hiburan semata, tetapi lebih kepada tanggung jawab moral untuk mengangkat nilai nasionalisme.

Kelembagaan kasus korupsi di Indonesia

Pelembagaan pembaratan korupsi di Indonesia dalam bentuk KPK bukan semata ditujukan untuk memutuskan bahwa sebuah perbuatan merupakan korupsi dan yang lain tidak. KPK secara rasional melaksanakan apa yang dikatakan Thomas dye What government choose to do or not to do. KPK tidak bias menangani semua kasus korupsi dan yang lain tidak.

KPK tidak bias menangani semua kasus korupsi yang mungkin adalah memprioritaskan semua penanganan kasus. Pilihan-pilihan yang dimiliki oleh KPK dan prioritas mana yang mesti diambil merupakan bagian dari apa yang dikenal ilmuwan social sebagai agenda setting (nugroho 2007; Howlwtt& Ramesh, 1995) tentu saja agenda setting dalam hal ini adalah bagian memasukkan seluruh kasus dan permasalahan ke dalam KPK untuk kemudian dipetakan.

Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan KPK dalam menyusun prioritas agenda setting. Pertama. Aksesibilitas sebuah perkara korupsi untuk ditindaklanjuti. Aksesibilitas ini disini dilihat dari sisi administrative dan legal seperti saksi dan bukti. Ketika sebuah kasus kekurangan bukti dan saksi tentunya KPK akan berpikir dua kali menanganinya.

Kedua, kapasitas dan kapabilitas KPK dalam menangani kasus tersebut. KPK hanya akan menangani kasus yang berada dalam range kemampuannya .Jika kasus korupsi dianggap terlalu kecil kerugiannya bagi negara dan penyelidikannya memakan biaya yang lebih besar tentu KPK akan mengabaikan perkara tersebut.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Reformasi Birokrasi dan pemberantasan Korupsi

Birokrasi dan reformasi birokrasi tidak lepas dari konsep dasar yang saling mempengaruhi sikap dan perilaku aparatur negara yaitu etika moral dan hokum seperti yang disampaikan oleh Badrus (2008) seperti yang dikutip Priyono (2012) menjelaskan bahwa etika birokrasi merupakan bagian integral dari sebuah kontak social antara pemerintah dengan pengguna layanan, moral akan menjadi bingkai para aktor agar berperilaku sesuai relnya. Salah satu agenda besar Road Map pelaksanaan reformasi birkorasi 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015. Dengan Road Map menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Pusat baik itu Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menerapkan dan melaksanakan Agenda Prioritas reformasi birokrasi 2015-2019.

Agenda prioritas tersebut telah sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Disamping itu agenda prioritas tersebut juga memperhatikan Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, Hambatan dan Tantangan Reformasi Birokrasi serta isu strategis yang berkembang. Isu strategis tersebut adalah reformasi birokrasi nasional, akuntabilitas kinerja, Pengawasan, Kelembagaan Birokrasi, Ketatalaksanaan, SDM Aparatur dan Pelayanan Publik. Agenda prioritas pada reformasi birokrasi nasional yakni penguatan payung hukum reformasi birokrasi nasional, peningkatan implementasi, penyempurnaan pelaksanaan dan peningkatan kualitasnya serta percepatan pelaksanaan reformasi di daerah.

Kemudian untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, ditetapkan agenda prioritas penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan implementasinya sebagai pilar manajemen kinerja serta pelaporan kinerja secara terbuka.

Pada penguatan pengawasan disusun agenda prioritas adalah penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sinergi pengawasan internal dengan eksternal dan pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegasi.

Untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien dilaksanakan agenda prioritas audit/review organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan desain kelembagaan birokrasi.

Agenda prioritas untuk menciptakan ketatalaksanaan yang baik ditetapkan agenda prioritas implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah, pengembangan e-government, menciptakan proses birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi, peningkatan kualitas e-procurement serta melaksanakan manajemen kearsipan birokrasi berbasis Teknologi Informasi. Penyelesaian UU Aparatur Sipil Negara, penetapan formasi CPNS/CASN secara ketat, sistem rekrutmen berbasis kompetensi, penyempurnaan sistem diklat, pelaksanaan sistem promosi secara terbuka dan penempatan jabatan berbasis kompetensi, sistem remunerasi berbasis kinerja, penguatan reward and punishment secara fair serta penguatan budaya kinerja menjadi agenda prioritas pada bidang SDM aparatur. Pelayanan publik yang terus menjadi perhatian masyarakat menjadi agenda prioritas dengan melaksanakan kebijakan peningkatan implementasi UU Pelayanan Publik, modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik, monitoring dan supervisi kinerja pelayanan dan penguatan integritas dalam pelayanan publik.

4. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Dalam kesimpulan saya sebagai penulis, bahwa korupsi adalah sebagian besar terdapat di diri oknum tsb, motivasi untuk mendapatkan yang lebih dan tidak pernah puas adalah sifat manusiawi dari manusia oleh karena itu harus dikontrol dan diredam dengan agama.

2. Saran

Ketika oknum korupsi sebaiiknya mulai saat ini lamgsung dipecat, dihukum seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, 2014: 63-77 "ANALISIS ISI KUALITATIF PESAN MORAL DALAM FILM BERJUDUL "KITA VERSUS KORUPSI" ANALISIS ISI KUALITATIF PESAN MORAL DALAM FILM BERJUDUL "KITA VERSUS KORUPSI" eJournal Ilmu Komunikasi, 2014, 2 (2): 63-77 ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id.

Kelak kelok korupsi; membaca rasionalitas dalam pemberantasan korupsi, djoharwinarlien sri. Kumpulan tulisan anggota Aslan dalam symposium ke 3 ASIAN.

Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebagai upaya mewujudkan reformasi Birokrasi yang bersih dan berwibawa. Arlupi Utami d. UNESA. Surabaya. Kumpulan tulisan anggota Aslan dalam symposium ke 3 ASIAN.

<https://pemerintah.net/agenda-prioritas-reformasi-birokrasi-2015-2019/>

<https://www.tagar.id/presiden-jokowi-dan-prioritas-reformasi-birokrasi>